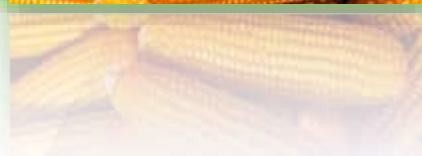




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik sesuai pedoman penyusunan yang ada.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 memuat Tujuan dan Sasaran pembangunan bidang/urusan pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra ini merupakan pedoman dan acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam menentukan langkah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Benteng, April 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN,



**Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M.**

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 197710142015011001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
DAFTAR TABEL .....	iii	
DAFTAR GAMBAR .....	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukum .....	4	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8	
1.4. Sistematika Penulisan .....	8	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10	
2.2. Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah .....	51	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	57	
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	63	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		66
BAB V PENUTUP .....	179	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2024 .....	25
Tabel 2.1.2.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024.....	26
Tabel 2.1.3.	Data Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	27
Tabel 2.1.4.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	27
Tabel 2.1.5.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Runag Tahun 2024 .....	28
Tabel 2.1.6.	Aset Tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 .....	28
Tabel 2.1.7.	Aset Alat Angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 .....	29
Tabel 2.1.8.	Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 .....	29
Tabel 2.1.9.	Aset Alat-Alat Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2024 .....	29
Tabel 2.1.10.	Aset Alat Besar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .	29
Tabel 2.1.11.	Aset Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	30
Tabel 2.1.12.	Aset Alat-alat Studio dan Komunikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.1.13.	Aset Alat-alat Laboratorium Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.1.14.	Aset Alat-alat Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .	31
Tabel 2.1.15.	Aset Komputer Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.1.16.	Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	32
Tabel 2.1.17.	Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	33
Tabel 2.1.18.	Aset Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .....	34

Tabel 2.1.19.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 .....	35
Tabel 2.1.20.	Hasil Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 2.1.21	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 .....	45
Tabel 2.2.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	50
Tabel 2.2.2.	Penentuan Isu Strategis .....	54
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	59
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	61
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	63
Tabel 3.6.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan .....	64
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	66
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	99
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	170
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 .....	173
Tabel 4.5.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci.....	175

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	24
Gambar 2	Konsep Renstra PD .....	57
Gambar 3	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	58
Gambar 4	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra PD.....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis 2025-2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 yang didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2024, penyesuaian indikator kinerja serta perubahan proyeksi target sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Dinas Pertanian dititikberatkan pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan anggaran prinsip efisiensi dan efektivitas perlu senantiasa dikedepankan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Termasuk dalam hal ini kemampuan mengantisipasi dan merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis. Guna menjamin tercapainya harapan tersebut, maka diperlukan suatu bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat perencanaan perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Renstra menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Renstra berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh perangkat institusi berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Menyadari pentingnya Renstra sebagaimana dikemukakan di atas, khususnya lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik, maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para *stakeholder* lain secara bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (*goal*) dan tujuan (*objective*) yang akan dicapai merupakan konsensus dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan Renstra.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh Kementerian Pertanian melalui program dan kegiatan yang dananya berasal dari Eselon I (satu) terkait. Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Pertanian antara lain: (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2). Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; (3). Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional; (4). Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; (5). Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; (6). Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; (7). Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional; (8). Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan (9). Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Hal tersebut sinergi dengan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar juga bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemerintah daerah terkait yang menangani sektor pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Prioritas pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Renstra Tahun 2025-2029 ini diantaranya adalah: (1). Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi, benih/bibit yang bermutu, bantuan alat dan mesin pertanian pasca panen serta

pengembangan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); (2). Peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi dan jagung; (3). Peningkatan produksi tanaman hortikultura yaitu jeruk keprok selayar. Didalam pengembangan hortikultura dilakukan upaya untuk merestorasi marwah hortikultura Kepulauan Selayar. Peningkatan produksi tanaman perkebunan kelapa yang merupakan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, disamping tanaman pala, cengkeh, dan jambu mete.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai tahapan penyempurnaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya terutama dalam mewujudkan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berkaitan dengan hal diatas Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra mutlak dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi arah pembangunan daerah dalam sektor pertanian serta sebagai koridor pelaksanaan pembangunan pertanian, disertai dengan data potensi wilayah sebagai representatif peluang pengembangan sektor pertanian periode 2025-2029. Selain menjabarkan kinerja pemerintahan dalam RPJMD, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 juga berisikan program kegiatan yang menunjang sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta program nasional.

Untuk itu maka dianggap perlu menyusun Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 113);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
44. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 815).
45. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
46. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
47. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran
48. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud agar :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. untuk penyediaan dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. untuk memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. untuk memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut

:

## **BAB I PENDAHULUAN**

berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN UMUM, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

berisi tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya dan kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu-isu strategis.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

berisi tujuan dan sasaran Renstra serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

berisi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V PENUTUP**

berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2024 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 815)

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan

Ketahanan Pangan;

4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;

2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
5. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
6. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
7. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaris Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subbagian Program** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
7. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat Daerah;
8. menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
9. menyusun dokumen evaluasi Dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
11. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
13. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
15. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
16. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

18. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
8. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
9. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
10. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
11. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
12. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
13. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
14. melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
16. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
17. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
18. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
19. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
20. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
21. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  23. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  24. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subbagian Keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
8. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
10. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
11. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
12. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
13. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
10. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

- penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
12. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan, produksi benih, pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  13. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih dan pengujian mutu benih;
  14. menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  15. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi;
  16. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
  17. menyiapkan bahan pengamatan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan;
  18. mengelola data organisme pengganggu tumbuhan;
  19. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  20. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  21. menyiapkan bahan penerapan cara produksi panga olahan yang baik dan pemberian surat keterangan layak pengolahan;
  22. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  23. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  24. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  25. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  26. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;

2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
7. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan;
8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
9. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan perkebunan;
10. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
12. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
13. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
14. memfasilitasi kajian rekomendasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
15. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan;
16. melaksanakan pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak;
17. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
18. melaksanakan pemberdayaan kelompok peternak;
19. melaksanakan pengembangan lahan penggembalaan umum;
20. melaksanakan pengawasan mutu obat hewan di tingkat distributor;

21. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
22. melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
23. memfasilitasi kajian rekomendasi pemberian izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
24. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
25. melaksanakan analisis risiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
26. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
27. melaksanakan pengujian kesehatan masyarakat veteriner;
28. menyiapkan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
29. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
30. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan layak pengolahan di bidang peternakan;
31. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
32. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
33. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
34. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
35. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
37. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan

penyuluhan;

4. pelaksanaan administrasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan;
7. mengembangkan potensi pengelolaan lahan dan irigasi serta memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;
8. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
9. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
10. melaksanakan pengembangan prasarana pertanian;
11. melaksanakan pembangunan prasarana pertanian;
12. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
13. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
14. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;
15. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan pertanian;
16. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
17. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
18. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
19. melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani;
20. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan;
21. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
22. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;

23. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
24. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;
25. menyusun dan mengelola database penyuluhan;
26. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
27. menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
28. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;
29. melaksanakan penyuluhan pertanian;
30. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
31. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
32. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
34. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang ketahanan pangan melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan

- pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. merumuskan kebijakan ketahanan pangan;
  7. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
  8. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta pengelolaan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  9. menganalisis dan mengkaji ketersediaan pangan daerah;
  10. melaksanakan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
  11. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan dan perhitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
  12. mengembangkan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
  13. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  14. melaksanakan pendampingan dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
  15. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok serta jaringan distribusi dan cadangan pangan;
  16. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  17. melaksanakan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  18. menganalisis dan mengkaji distribusi dan cadangan pangan daerah;
  19. melaksanakan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  20. melaksanakan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  21. melaksanakan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  22. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  23. melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  24. melaksanakan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  25. melaksanakan pengembangan pangan pokok lokal;
  26. melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;

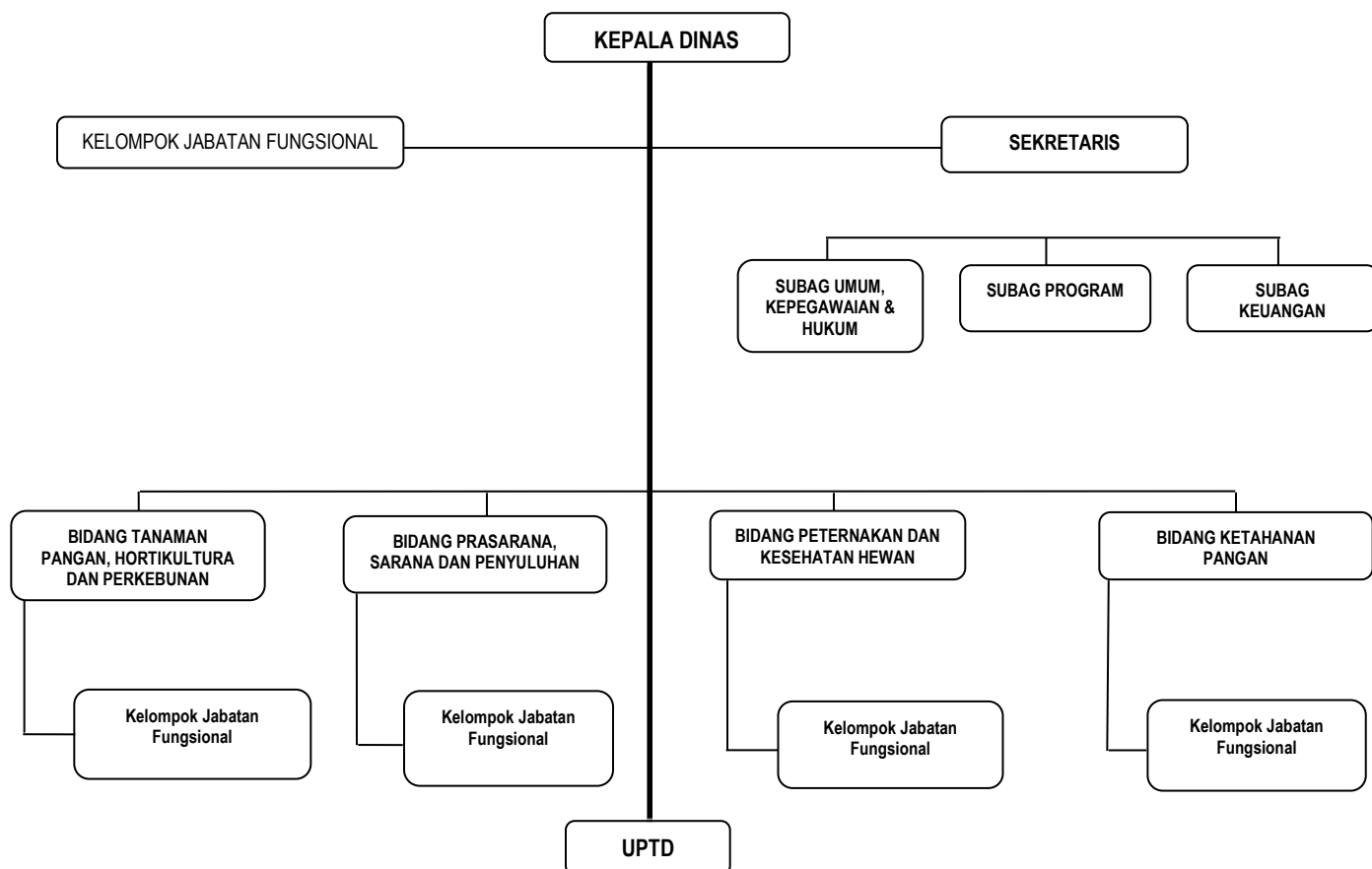
27. memfasilitasi kajian rekomendasi/sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
28. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
29. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
30. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
31. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang ketahanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
33. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Struktur Organisasi Dinas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021, Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
  - Subbagian Program; dan
  - Subbagian Keuangan.
3. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD
8. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024)



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung internal keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2024 adalah 125 (seratus dua puluh lima) orang.

a. Struktur Jabatan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Struktur Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2024

No	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

1.	Eselon II	1	0	1 orang
2.	Eselon III A	0	1	1 orang
3.	Eselon III B	2	2	4 orang
4.	Eselon IV A	1	2	3 orang
5.	Eselon IV B	-	2	2 orang
6.	Non Eselon	8	15	23 orang
7.	Fungsional	38	42	80 orang
8.	PPPK (Non Eselon)	5	5	10 orang
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124 orang</b>

b. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

<b>NO.</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	SLTA	27 orang
2.	DIPLOMA SATU (D1)	0 orang
3.	DIPLOMA TIGA (D3)	8 orang
4.	SARJANA (S1/D4)	82 orang
5.	MAGISTER	7 orang
<b>Jumlah</b>		<b>124 orang</b>

c. Personil pelaksana tugas pokok dan fungsi

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1.3. Data Pegawai PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

<b>Bagian</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala Dinas	1 orang

Sekretariat	11 orang
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	6 orang
Bidang Peternakan	7 orang
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	5 orang
Bidang Ketahanan Pangan	10 orang
UPTD Perbenihan Tanaman	1 orang
UPTD Perbibitan Ternak	2 orang
Fungsional Kabupaten	5 orang
Penyuluh Pertanian Lapangan	72 orang
<b>Jumlah</b>	<b>124 orang</b>

d. Jenis Kelamin

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	55 orang
2.	Perempuan	69 orang

e. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.5. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Pria	Wanita	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	3	5	8
2.	Pembina Tk. I	IV/b	3	3	6

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Pria	Wanita	
3.	Pembina	IV/a	5	7	12
4.	Penata Tk. I	III/d	8	23	31
5.	Penata	III/c	8	5	13
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	8	12	20
7.	Penata Muda	III/a	5	8	13
8.	Pengatur Tk. I	II/d	6	2	8
9.	Pengatur	II/c	6	1	7
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	1	1
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
	<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>67</b>	<b>119</b>

Selain personil aparatur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sejumlah aset secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Tanah

Aset tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari tanah bangunan kantor pemerintah sebanyak 3 unit, tanah bangunan kandang hewan 1 unit, tanah bangunan tempat kerja lainnya 1 unit, dan tanah kebun induk 3 unit. Aset tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.6. Aset Tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Kategori Tanah	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3
2	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1
4	Tanah Kebun Induk	3

b. Alat Angkutan

Alat angkutan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kendaraan dinas/ operasional roda empat 2 (dua) unit, dan kendaraan dinas/ operasional roda dua, dan alat angkut apung berupa joloro. Aset alat angkutan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.7. Aset Alat Angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Alat-Alat Angkutan	Jumlah
1	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (Toyota Pick Up)	1
2	Mini Bus (Toyota/Kijang Inova)	1
3	Sepeda Motor	95
4	Alat kendaraan darat bermotor lainnya (kaisar)	1
5	Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya	1
6	Alat angkutan apung bermotor khusus lainnya	1

c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Aset alat-alat bengkel dan alat ukur berupa alat ukur kadar air yang digunakan untuk mengukur kandungan air gabah, jagung dan biji-bijian lainnya. Selain alat ukur kadar air terdapat pula GPS, pada bidang pertanian GPS terkait dengan navigasi kendaraan pertanian, pemetaan kawasan dan lahan pertanian maupun pembangunan dan aplikasi dari suatu sistem informasi pertanian. Aset alat-alat bengkel dan alat ukur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.8. Aset Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	Jumlah
1	Alat Ukur Kadar Air (Moisture Meter)	3
3	Global Positioning System (GPS)	9

d. Alat-alat Pertanian

Aset alat-alat pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara

lain berupa traktor tangan, alat panen (power thresher), mesin pemotong padi, dan alat pasca panen. Alat-alat pertanian tersebut digunakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Aset alat-alat pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.9. Aset Alat-alat Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Alat-Alat Pertanian	Jumlah
1	Traktor Tangan dengan perlengkapannya	30
2	Alat Pengolahan Lainnya	12
3	Alat Processing Lainnya	1
4	Alat Pasca Panen Lainnya	1

e. Alat Besar

Selain alat pertanian, terdapat pula alat besar yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Alat besar tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1.10. Aset Alat Besar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Alat Besar	Jumlah
1	Pompa Air	5

f. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan rumah tangga merupakan peralatan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat-alat kantor dan rumah tangga dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1.11. Aset Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah
01	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3
02	Mesin Absen (Time Recorder)	1
03	Lemari Besi/Metal	7
04	Lemari Kayu	19
05	Rak Besi	35
06	Filing Cabinet Besi	7

<b>No.</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah</b>
07	Brandkas	1
08	Alat Pemotong Kertas	1
09	LCD Projector/Infocus	7
10	Papan Pengumuman	1
11	Alat Kantor Lainnya	70
12	Meja Kerja Kayu	68
13	Kursi Besi/Metal	56
14	Meja Rapat	165
15	Tempat Tidur Kayu	2
16	Meja 1/2 Biro	68
17	Kursi Fiber Glas/Plastik	175
18	Kursi Rapat	533
19	Kursi Tamu	15
20	Kursi Putar	19
21	Meja Komputer	10
22	Mesin Pemotong Rumput	1
23	Lemari Es	4
24	A.C. Window	18
25	A.C. Split	13
26	Kipas Angin	7
27	Alat Pendingin lainnya	1
28	Televisi	8
29	Loudspeaker	1
30	Sound System	9
31	Microphone	8
32	Unit Power Supply	7
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4
34	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5

<b>No.</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah</b>
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
37	Meja Rapat Pejabat lainnya	3
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
41	Kursi Kerja Pejabat lainnya	11
42	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	10
43	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	69
44	Buffet Kaca	1
45	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4

g. Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat studio dan komunikasi berupa kamera, proyektor, sound system, loudspeaker, handycam, wireless, dan lain-lain digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat-alat studio dan komunikasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1.12. Aset Alat – alat Studio dan Komunikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>Jumlah</b>
01	Talk Back Unit	1
02	Professional Sound System	1
03	Digital Audio Taperecorder	1
04	Peralatan studio audio lainnya	2
05	Camera Electronic	29
06	Layar Film/Projector	11
07	Camera Digital	2
08	Alat Studio Lainnya	8
09	Telephone Mobile	1
10	Facsimile	1

11	Wireless Amplifier	10
12	Genset	1

h. Alat – alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium berupa mixer berfungsi sebagai pencampur bahan pakan ternak, selain itu terdapat pula grinder dan alat laboratorium lainnya berfungsi menunjang kegiatan bidang pertanian dan peternakan. Aset alat-alat laboratorium dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.13. Aset Alat-alat Laboratorium Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Alat alat Laboratorium	Jumlah
01	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya	1
02	Alat laboratorium proses pengolahan panas lainnya	2
03	Mesin Spinning	1
04	Generator	15
05	Alat laboratorium proses/teknik kimia lainnya	1

i. Alat – alat Kedokteran/ Kesehatan

Alat-alat kedokteran/kesehatan merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan hewan dan penanganan ternak. Aset alat-alat kesehatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1.14. Aset Alat-alat Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Alat-Alat Kedokteran/Kesehatan	Jumlah
1	Emergency Kit	39

j. Komputer

Aset komputer mencakup komputer dan perlengkapannya serta alat penunjang komputer. Komputer digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset komputer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.15. Aset Komputer Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Komputer	Jumlah
01	P.C Unit	20

02	Laptop	114
03	Note Book	30
04	Personal Komputer lainnya	1
05	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1
06	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
07	Speaker Komputer	15
08	Printer (Peralatan Personal Komputer)	86
09	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
10	Peralatan Personal Komputer lainnya	3
11	Modem	1
12	Wireless Access Point	2
13	Acces Point	2

k. Gedung dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dalam kondisi siap pakai. Aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1.16. Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>JUMLAH</b>
01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18
02	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2
03	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5
04	Bangunan Gudang Lain-lain	5
05	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1
06	Bangunan Rumah Sakit Hewan	1
07	Gedung Pos Jaga Permanen	3
08	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1
09	Gedung Pemotong Hewan Permanen	1
10	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain	2
11	Bangunan Untuk Kandang	4

12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	3
14	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1
15	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	7
16	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1
17	Asrama Permanen	4
18	Flat/rumah Lain-lain	1
<b>No.</b>	<b>Monumen</b>	<b>Jumlah</b>
01.	Pagar BPP	12
<b>No.</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>Jumlah</b>
01	Pagar Permanen	3
02	Pagar Semi Permanen	1

1. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset jalan meliputi jalan khusus kompleks (jalan tani area peternakan), jalan lingkungan/ halaman (jalan tani area Rumah Potong Hewan), jalan khusus lain-lain dan jalan usaha tani (jalan tani area pertanian dan perkebunan). Aset Irigasi berupa cek dam, irigasi air tanah dangkal, irigasi air tanah dalam, instalasi air bersih untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Aset jaringan/instalasi meliputi instalasi listrik RPH dan Puskesmas, instalasi air bersih Puskesmas, instalasi biogas RPH dan pembangkit listrik tenaga surya di Kec. Pasimasunggu. Aset jalan dan jaringan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 2.1.17. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>Jumlah</b>
01	Jalan Desa Lain-lain (Jalan Usaha Tani/JUT)	738
02	Jalan Khusus Kompleks	5
03	Jalan Khusus Lainnya	4
04	Jalan Khusus Lain-lain	3
<b>No</b>	<b>Bangunan Air / Irigasi</b>	<b>Jumlah</b>
01	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	3
02	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	2

03	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	2
04	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	2
05	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1
06	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1
07	Bangunan air irigasi lainnya	3
08	Krib Pengaman Sungai/Pantai	9
09	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	27
<b>No</b>	<b>Instalasi</b>	<b>Jumlah</b>
01	Instalasi Air Tanah Dangkal Lain-lain	1
02	Sumur Resapan	3
03	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1
04	Instalasi Jaringan Pipa gas Lain-lain	1
<b>No</b>	<b>Jaringan</b>	<b>Jumlah</b>
01	Jaringan Distribusi Lain-lain	3

m. Aset Tetap Lainnya

Aset lainnya berupa hewan dan tanaman.

Tabel. 2.1.18. Aset Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sapi Bali di Tanamalala	460
2	Tanaman keras	5

**Potensi Sumber Daya Alam**

Pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Gambaran potensi sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya dicerminkan dari potensi pada kawasan Pertanian.

Kawasan pertanian pangan terdiri atas sawah lahan basah dan lahan kering seluas 4.239 (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar terdapat di : a. Kecamatan Bontoharu; b. Kecamatan Bontomanai; c. Kecamatan Pasimasunggu; d. Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan e. Kecamatan Bontosikuyu. serta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.829 hektar yang terdapat pada :

a. Kecamatan Pasimasunggu Timur seluas kurang lebih 834 (delapan ratus tiga puluh empat) hektar; b. Kecamatan Pasimasunggu seluas kurang lebih 819 (delapan ratus sembilan belas) hektar; c. Kecamatan Bontosikuyu seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar; d. Kecamatan Bontomanai seluas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar; dan e. Kecamatan Bontoharu seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar.

Kawasan Hortikultura Fungsi kawasan hortikultura yaitu menghasilkan hasil pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduk bagi masyarakat seluas 14.142 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar. Kawasan hortikultura dimaksud terdapat di : a. Kecamatan Bontomatene; b. Kecamatan Bontosikuyu; c. Kecamatan Pasimarannu; d. Kecamatan Pasimasunggu Timur; e. Kecamatan Pasimasunggu; f. Kecamatan Bontoharu; g. Kecamatan Pasilambena; h. Kecamatan Buki; i. Kecamatan Taka Bonerate; dan j. Kecamatan Bontomanai.

Kawasan Perkebunan Jenis tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Selayar adalah perkebunan Kelapa, dan umumnya termasuk perkebunan rakyat yang sudah sejak lama dikembangkan bahkan pertanaman Kelapa di Kabupaten Selayar sudah menyatu dengan budaya penduduk Kabupaten Selayar pada umumnya. Disamping itu juga terdapat beberapa komoditi perkebunan lainnya seperti Jambu Mente, Cengkeh, Kemiri, Pala, Melinjo dan Jeruk Keprok Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Selayar seluas 43.773 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdapat di : a. Kecamatan Bontosikuyu; b. Kecamatan Bontomanai; c. Kecamatan Bontoharu; d. Kecamatan Pasilambena; e. Kecamatan Pasimarannu; f. Kecamatan Buki; g. Kecamatan Bontomatene; h. Kecamatan Pasimasunggu; i. Kecamatan Taka Bonerate; dan j. Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Kawasan Peternakan Jenis usaha ternak yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar digolongkan atas dua yaitu ternak besar/kecil terdiri atas sapi, kuda, kerbau, kambing, dan domba, sedangkan ternak unggas meliputi ternak ayam buras, ras, dan itik. Kawasan peternakan seluas 4.062 (empat ribu enam puluh dua) hektar, terdapat di : a. Kecamatan Pasimasunggu; b. Kecamatan Bontomatene; dan c. Kecamatan Pasimarannu.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.19. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				85	85,5	79,87	79,9	79,93	79,8	74,6	76,9	81,4	79,80	0,94	0,87	0,10	1,02	1,00
2.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				7,39	7,76	7,85	8,48	9,15	7,85	8,24	8,24	6,96	4,98	1,06	1,06	1,05	0,82	0,54
3.	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB				16,03	16,03	16,03	16,84	17,17	16,03	16,75	16,23	16,71	19,23	1,00	1,04	1,01	0,99	1,12
4.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB				2,94	2,94	2,94	3,09	3,28	2,94	2,83	2,64	2,5	2,43	1,00	0,96	0,90	0,81	0,74
5.	Kontribusi sektor				0,99	0,99	0,99	1,04	1,05	0,99	0,96	0,95	0,94	1,00	1,00	0,97	0,96	0,90	0,95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	hortikultura terhadap PDRB																		
6.	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB				10,99	10,99	10,99	11,54	11,66	10,99	11,86	11,53	12,18	14,41	1,00	1,08	1,05	1,06	1,24
7.	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB				1,11	1,11	1,17	1,18	1,19	1,11	1,10	1,11	1,09	1,10	1,00	0,99	0,95	0,92	0,92
8.	Cakupan Sarana pertanian				100	100	100	100	100	100	100	100	80	83,86	1,00	1,00	1,00	0,80	0,84
9.	Cakupan Prasarana Pertanian				100	100	100	100	100	100	100	97,87	100	87,5	1,00	1,00	0,98	1,00	0,88
10	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana				5,0	5,0	5,56	5,28	5,02	5,85	5,95	78,64	30,86	30,86	1,17	1,19	14,14	5,84	6,15

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penyakit Hewan Menular																		
11.	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian				24,24	23,09	21,99	20,89	19,85	23,15	8,56	21,85	20,75	19,85	0,96	0,37	0,99	0,99	1,00
12	Persentase fasiltasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian				5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13	Cakupan Bina Kelompok Tani				23,06	20,0	19,17	22,72	26,27	15,62	19,72	26,95	17,14	4,32	0,68	0,99	1,41	0,75	0,16
	<b>Urusan Pangan</b>																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	Skor Pola Pangan Harapan				85	85,5	79,87	79,90	79,93	79,8	74,6	76,9	81,40	79,80	0,94	0,87	0,96	1,02	1,00
15.	Persentase desa rawan pangan yang ditangan				37,50		50	62,50	75	37,5		24,39	60,87	41,18	1,00		0,49	0,97	0,55
16.	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan				9,09	12,25	27,27	36,36	45,45	9,09	12,25	48,33	51,47	51,45	1,00	1,00	1,77	1,42	1,13
17.	Persentase penanganan kerawanan pangan				47,50	24,39	52,50	57,50	62,50	47,5	24,39	19,35	34,74	26,09	1,00	1,00	0,37	0,60	0,42
18.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				80	90	80	80	80	80	100	100	80	100	1,00	1,11	1,25	1,00	1,25

Dengan segala potensi dan sumberdaya yang ada maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan secara maksimal telah melakukan segala daya dan upaya untuk melaksanakan urusan yang diembannya dengan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai Tabel 2.1.19 sudah dapat dilaksanakan walaupun terdapat target yang tidak dapat dicapai disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti dapat diuraikan sebagai berikut :

- penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kondisi ini disebabkan ketersediaan air untuk tanaman masih kurang, penggunaan alsintan modern dan bibit unggul yang belum merata; Pengembangan budidaya dengan penerapan teknologi dan inovasi yang belum optimal; Masih lemahnya penanganan hama dan penyakit. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja produktivitas pertanian per hektar per tahun, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Penurunan luas panen dan produksi dipengaruhi oleh factor cuaca atau kondisi el nino yang menyebabkan berkurangnya luas tanam karena kurangnya ketersediaan air untuk pertanaman.
- Nilai PDRB dari 4 sub sektor mengalami fluktuatif. Sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 hal ini disebabkan kurangnya produksi tanaman pangan karena dampak el nino. Berkurangnya produksi tanaman pangan yang dipengaruhi oleh kurangnya luas tanam dan luas panen serta kurangnya benih tanaman yang berkualitas. Sub sektor Hortikultura dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap system budidaya dan produksi hortikultura, baik buah-buahan maupun sayuran. Selain itu, peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh upaya penanaman sayuran oleh petani melalui kegiatan pekarangan. Sub Sektor Perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 hal ini disebabkan karena meningkatnya populasi tanaman menghasilkan didukung dengan perawatan, pemangkasan, pemupukan dan peremajaan tanaman serta adanya upaya pengendalian terhadap serangan OPT seperti pengendalian hama kutu perisai pada tanaman kelapa. Sub sector peternakan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan yang dipengaruhi tingkat produksi ternak yang menurun karena pola manajemen pemeliharaan ternak yang masih kurang dan tidak terarah dimana peternak belum memperhatikan kualitas pakan dan tatacara pemeliharaan yang dianjurkan, perkandangan, penanganan penyakit dan pemasaran diperparah dengan adanya perubahan iklim global dimana ternak yang dipelihara secara ekstensif

- akan berakibat pada penurunan bobot badan ternak secara drastis sehingga ada kecenderungan peternak untuk menjual ternaknya.
- Sarana pertanian berupa bibit tanaman, bibit dan pakan ternak, pupuk dan alsintan dimanfaatkan oleh kelompok tani/ gabungan kelompok tani secara maksimal dalam upaya peningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya. Hal ini didukung pula peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan kelompok tani terhadap sarana pertanian. Namun terdapat sarana pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani karena adanya fenomena iklim atau dampak el nino.
  - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebanyak 931 kasus, mengalami penurunan sebesar (8,09%) dari tahun 2023 yaitu 1.013 kasus penyakit. Capaian penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit tahun 2024 terjadi karena pemeliharaan dan pelayanan kesehatan hewan semakin baik. Hal ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan penyakit hewan. Ketersediaan obat-obatan ternak dan perlengkapan kesehatan hewan sangat mempengaruhi proses pelayanan ternak kepada masyarakat/ peternak. Selain itu, SDM peternakan juga sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan.
  - Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berdampak pada semua kecamatan dilakukan pada beberapa komoditi baik komoditi perkebunan, hortikultura maupun tanaman pangan. Pengendalian dilakukan secara mekanis, sanitasi dan kimiawi. Pengendalian OPT didukung oleh adanya kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengendalian OPT dengan pemanfaatan paket teknologi yang ramah lingkungan. Peran serta petani dan petugas pengamat hama juga sangat membantu dalam pengendalian OPT.
  - Fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian, tahun 2024 terdapat 265 izin usaha pertanian yang diterbitkan yaitu izin pengeluaran ternak. Penerbitan izin mencapai 100 persen karena didukung adanya peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak.
  - Cakupan Bina Kelompok Tani sebesar 4,31% dimana kelompok tani dan gabungan kelompok tani tahun 2024 masing-masing sebanyak 892 poktan, 82 Gapoktan. Sedangkan Poktan dan Gapoktan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian sebanyak 42 poktan/Gapoktan. Dari target indicator cakupan bina

kelompok tani sebesar 26,27% diperoleh hasil atau realisasi capaian adalah 4,31% atau sebesar 16,40%.

Pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum sepenuhnya berbasis kinerja, antara sasaran dengan program kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal. Disamping itu masih sangat lemahnya evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat daerah. Secara akumulasi, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang masih sangat rendah atau belum mencapai target, nilainya atau pencapaian lebih rendah ketika dibandingkan dengan nilai pencapaian provinsi ataupun nasional sehingga masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan pelayanan berkualitas pada semua aspek pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public, khususnya pada sector pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 77,50.

#### *Analisis Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Daerah*

Analisis capaian dari indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, memuat target dan capaian yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai pada pelaksanaan tahun 2024 sebagai tahapan tahun keempat pelaksanaan Renstra tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan capaian dan target yang ditetapkan. Interpretasi untuk melihat ketercapaian dan kesesuaian antara target dan capaian adalah ketika capaian lebih besar dari target yang diinterpretasikan melampaui ( $>$ ), capaian sama dengan target yang diinterpretasikan sesuai ( $=$ ), dan capaian lebih kecil dari target yang diinterpretasikan belum tercapai ( $<$ ).

Tabel 2.1.20. Hasil Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
						Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	16,75	16,23	16,84	16,71	17,17	19,23	Melampaui
	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi Sektor tanaman pangan/palawija terhadap PDRB	%	2,83	2,64	3,09	2,5	3,28	2,43	Belum tercapai
		Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,96	0,95	1,04	0,94	1,05	1,00	Belum tercapai
		Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB	%	11,86	11,53	11,54	12,18	11,66	14,41	Melampaui
		Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,10	1,11	1,18	1,09	1,19	1,10	Belum tercapai

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
						Target	Capaian	Target	Capaian	
	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,00	75,26	75,50	71,86	75,75	72,03	Belum tercapai
	Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	76,9	81,40	79,90	79,80	79,93	77,5	Belum tercapai
	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks	51,24 (CC)	55,65 (CC)	64,00 (CC)	53,30 (CC)	68,00 ( B )	60,55 ( B )	Belum Tercapai
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	59,01	64,30	65 (B)	65,35	70 (BB)	65,35	Belum tercapai

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
						Target	Capaian	Target	Capaian	
		Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Nilai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks			75,50	78,8	76,00	77,50	Melampaui

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

### *Pendapatan dan Belanja*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan utama, yaitu: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, PAD mencerminkan kewenangan daerah yang pengelolaannya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, PAD sering digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Peningkatan PAD merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya meningkatkan penerimaan PAD sebagai bagian dari optimalisasi pendanaan daerah guna memperkuat implementasi otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan PAD menjadi prioritas dalam mendukung pengeluaran APBD agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat secara lebih optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2021-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, PAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercatat sebesar Rp. 12.811.500 juta, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp. 26.160.000 Juta. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah PAD mencapai Rp. 39.067.500 Juta, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi Rp. 13.027.500 Juta. Selama lima tahun terakhir, PAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,96 persen per tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas empat komponen. Pertama, Belanja Operasi yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Kedua, Belanja Modal yang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Ketiga, Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi belanja daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2021-2024 menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 1,03 persen per tahun. Secara nominal, belanja daerah pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 1.010,04 miliar dan pada tahun 2024 (unaudited) menurun menjadi Rp. 968,62 miliar.

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.21. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.384.293.181	12.943.983.520	10.768.894.800	11.843.462.576	12.563.458.129	2.327.942.066	12.853.090.935	10.681.839.956	11.679.645.351	12.381.473.070	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian pangan	-	13.565.800	-	-	-	-	11.115.800	-	-	-		0,82					
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	85.650.000	585.968.200	194.415.700	55.223.500	206.393.100	84.994.610	571.411.100	194.385.700	37.336.200	36.166.100	0,99	0,98	1,00	0,68	0,18		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	46.172.200	46.172.200	7.635.000	4.907.000	-	41.928.000	41.928.000	7.091.400	4.454.200	0,00	0,91	0,91	0,93	0,91		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	10.000.000	10.000.000	6.762.000	6.660.000	-	8.710.005	8.710.005	222.000	5.409.200	0,00	0,87	0,87	0,03	0,81		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.046.018.650	4.492.284.400	3.288.202.000	1.956.515.800	1.730.209.900	9.987.263.887	4.428.671.062	3.199.498.700	1.280.829.448	1.357.341.775	0,99	0,99	0,97	0,65	0,78		
Program Penyediaan dan Pengembangan	-	6.168.138.250	7.842.752.157	1.969.037.000	2.291.290.995	-	5.896.511.346	7.759.909.566	1.553.097.729	1.917.249.448		0,96	0,99	0,79	0,84		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Prasarana Pertanian																	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	297.000.000	279.127.300	236.711.000	304.967.500	177.741.905	295.958.240	267.930.700	229.451.000	162.637.800	170.536.200	1,00	0,96	0,97	0,53	0,96		
Program Penyuluhan Pertanian	277.895.000	197.476.000	116.970.000	225.067.600	35.723.800	178.889.840	191.126.080	102.647.000	200.775.800	35.112.400	0,64	0,97	0,88	0,89	0,98		
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	91.126.080	31.687.000	20.431.200	12.700.700	-	91.126.080	31.687.000	19.566.000	12.700.700		1,00	1,00	0,96	1,00		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	159.102.500	-	-	-	-	144.950.000	-	-	-	-	0,91						
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	50.000.000					50.000.000					1,00						

Berdasarkan Tabel 2.1.21 menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dikatakan baik untuk tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rata-rata rasio anggaran dan realisasi mencapai 0,90. Pada tahun 2021 mencapai 0,67, pada tahun 2022 mencapai 0,66; pada tahun 2023 mencapai 0,68 dan yang paling memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2024 yaitu 0,62.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Adanya beberapa program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya dianggarkan pada tahun-tahun tertentu saja hal ini disebabkan adanya kebijakan baru.
2. Dengan efisiensi anggaran, menyebabkan *refocussing* anggaran dan koordinasi yang mendukung suatu kegiatan mengalami hambatan karena adanya larangan melakukan pertemuan secara langsung.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kelompok layanan sasaran yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, serta ketahanan pangan.

Kelompok layanan sasaran ini untuk mendorong kemandirian petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menciptakan nilai tambah melalui pengembangan agribisnis berkelanjutan. Layanan tersebut disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian daerah. Kelompok layanan sasaran ini meliputi:

##### **1. Petani dan Kelompok Tani**

Petani sebagai pelaku utama produksi pangan merupakan sasaran prioritas. Layanan yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan, bimbingan teknis, serta pendampingan teknologi pertanian modern. Program pemberdayaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

##### **2. Pelaku Usaha Agribisnis dan UMKM Pangan**

Dinas memberikan layanan fasilitasi pengembangan usaha budidaya dan pasca panen. Pendampingan dilakukan melalui pembinaan rantai pasok, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran produk lokal.

##### **3. Masyarakat Umum**

Melalui program diversifikasi dan ketersediaan pangan, Dinas melayani masyarakat umum untuk memastikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Edukasi konsumsi pangan lokal dan gizi seimbang juga menjadi fokus

layanan kepada masyarakat.

#### 4. Penyuluh Pertanian dan Mitra Strategis

Penyuluh pertanian dan mitra strategis, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun sektor swasta, merupakan sasaran layanan untuk meningkatkan transfer teknologi dan inovasi. Layanan ini berupa pelatihan, penyediaan data, serta penguatan jejaring kerja sama.

#### 5. Pemerintah Desa dan Lembaga Lokal

Pemerintah desa serta lembaga lokal menjadi mitra dalam mendukung pembangunan pertanian terpadu berbasis potensi lokal. Layanan ini mencakup pendampingan program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pengelolaan lahan, dan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

#### 6. Konsumen dan Pasar Pangan

Untuk menjamin stabilitas harga dan distribusi pangan, Dinas memberikan layanan pengawasan, monitoring harga, dan menjaga ketersediaan pangan pokok di pasar. Hal ini bertujuan melindungi konsumen dan memastikan sistem pangan berjalan lancar.

### **2.1.5. Mitra Kerja Dalam Layanan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bermitra dengan berbagai stakeholder pertanian dan pangan dalam memberikan layanan, seperti :

#### 1. Mitra Pemerintah (Vertikal dan Daerah)

- Kementerian Pertanian RI  
(melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan)  
Dukungan program nasional, bantuan benih, alsintan, dan pengembangan kawasan.
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)  
Kebijakan dan bantuan dalam penguatan sistem pangan lokal.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan  
Dukungan teknologi pertanian adaptif, pelatihan petani, dan demplot inovasi.
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan  
Sinkronisasi program provinsi, fasilitasi kegiatan strategis, dan bantuan sarana-prasarana.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan  
Dukungan vaksin, kesehatan hewan, dan pengembangan peternakan rakyat.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan  
Penguatan cadangan pangan daerah, diversifikasi pangan, dan sistem logistik pangan.

- Bapperida dan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Selayar  
Sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan pertanian dan infrastruktur pendukung.
- Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPBD  
Kolaborasi dalam penanganan kerawanan pangan, stunting, dan ketahanan pangan berbasis masyarakat.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kolaborasi dalam perencanaan dan penganggaran dana desa
- Satatuan Polisi Pamong Praja  
Kolaborasi dalam pengendalian dan penertiban hewan ternak
- Tim Satgas Pangan Kepolisian
- Tentara Nasional Indonesia
- Badan Pusat Statistik
- BUMN seperti Badan Pusat Logistik

## 2. Mitra Non-Pemerintah

- Kelompok Tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)  
Mitra utama pelaksana kegiatan di lapangan dan penerima manfaat program.
- Kelompok Wanita Tani (KWT)  
Penggerak kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan diversifikasi pangan keluarga.
- Penyuluh Pertanian (ASN dan THL-TBPP)  
Ujung tombak pelayanan informasi, pendampingan teknologi, dan penguatan kapasitas petani.
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Mitra dalam pengembangan usaha tani terpadu, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran produk.
- Lembaga Keuangan Mikro / Perbankan (Bank Sulselbar, BRI, dll)  
Dukungan permodalan petani, program KUR sektor pertanian, dan literasi keuangan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi  
Dukungan advokasi, riset, pelatihan, serta pendampingan pembangunan berkelanjutan.
- Pelaku Usaha / Offtaker / Mitra Dagang  
Kerja sama dalam kemitraan agribisnis, pengadaan sarana produksi, dan hilirisasi hasil pertanian.
- Media Massa dan Komunitas Digital  
Penyebaran informasi pertanian, edukasi publik, serta promosi hasil pertanian lokal.

## 3. Masyarakat dan Pemerintah Desa

- Pemerintah Desa dan BPD  
Peran penting dalam sinergi program pertanian dengan dana desa dan

pembangunan wilayah.

- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Karang Taruna

Dukungan dalam penguatan partisipasi masyarakat dan pengembangan desa agropangan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu - Isu Strategis

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi, Akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Belum optimalnya ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan pangan memadai</li> <li>- Masih kurangnya infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang modern dan terintegrasi</li> <li>- Terjadinya degradasi lahan</li> <li>- Belum optimalnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan lumbung pangan masyarakat</li> <li>- Terjadinya anomali iklim</li> <li>- Belum idealnya cadangan pangan pemerintah</li> <li>- Terjadinya banyak kehilangan pangan (food loss dan food waste)</li> <li>- Masih berfluktuasinya stok pangan</li> </ul>

No.	Indikator	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penguatan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan masyarakat dan pemerintah</li> <li>- Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.</li> <li>- Masih adanya daerah rentan rawan pangan dan gizi</li> </ul>
			Masih kurangnya keterjangkauan masyarakat terhadap pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kemampuan daya beli masyarakat yang beragam</li> <li>- Tingginya harga pangan akibat rantai distribusi panjang</li> <li>- Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang belum merata karena kondisi geografis dan tingkat kelayakan sarana/prasarana lalu lintas pangan, khususnya daerah tertinggal, terisolasi dan terluar.</li> <li>- Belum terdigitalisasinya database logistic dan distribusi pangan daerah</li> </ul>
			Belum optimalnya pemanfaatan pangan secara beragam, bergizi, sehat dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya konsumsi pangan beragam, bergizi, sehat dan aman, khususnya bersumber dari pangan lokal</li> <li>- Ketergantungan pada impor pangan tertentu</li> <li>- Kurangnya inovasi usaha olahan berbasis pangan lokal</li> <li>- Masih rendahnya literasi dan adopsi teknologi pangan</li> <li>- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan beragam, bergizi, sehat dan aman</li> <li>- Penggunaan kimia</li> </ul>

No.	Indikator	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
				berbahaya pangan segar asal tumbuhan - Belum rutinnya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan di daerah - Belum masivnya perkembangan pertanian berbasis organik
2	Produktivitas pertanian	produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum optimal	Rendahnya kesuburan dan daya dukung lahan Keterbatasan sarana dan prasarana produksi Rendahnya penerapan teknologi budidaya Serangan hama dan penyakit tanaman Perubahan iklim dan cuaca ekstrem	- Penggunaan pupuk kimia tidak berimbang - Kurangnya penggunaan pupuk organik dan amelioran - Lahan kritis atau marginal tidak direklamasi - Alsintan tidak merata atau tidak sesuai kebutuhan - Akses air irigasi terbatas, banyak sawah tadah hujan - Benih unggul tidak tersedia tepat waktu - Minimnya pelatihan teknis dan demplot percontohan - Terbatasnya penyuluh pertanian lapangan (PPL) aktif - Kurang akses informasi teknologi oleh petani - Monitoring dan pengendalian OPT belum sistematis - Kurangnya penggunaan pestisida nabati dan ramah lingkungan - Minimnya pelatihan pengamatan hama (POPT) - Tidak adanya sistem peringatan dini kekeringan - Tidak tersedia asuransi

No.	Indikator	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
				usaha tani bagi petani - Pola tanam tidak menyesuaikan musim yang berubah
			Rendahnya motivasi dan kapasitas petani	- Rata-rata usia petani tua, regenerasi lambat - Harga jual hasil pertanian tidak stabil - Minimnya insentif atau kemitraan yang menguntungkan
			Terbatasnya pengolahan dan pemasaran hasil	- Petani menjual hasil dalam bentuk segar/mentah - Akses ke pasar luar daerah terbatas - Belum ada koperasi tani atau offtaker tetap

### 2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh dari analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian.

Isu-isu lingkungan dinamis yang relevan dengan urusan pangan dan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

#### 1. Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Meskipun Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, produktivitas komoditas utama seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi budidaya, penggunaan sarana produksi yang belum efisien, serta lemahnya integrasi sistem agribisnis dari hulu ke hilir.

#### 2. Terbatasnya Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Produksi

Kondisi geografis kepulauan menyebabkan keterbatasan akses jalan produksi, irigasi teknis, serta distribusi hasil pertanian antar pulau. Hal ini menjadi hambatan dalam menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada musim paceklik atau gangguan cuaca ekstrem.

3. Minimnya Regenerasi Petani dan Kelembagaan Ekonomi Tani

Rata-rata pelaku utama pertanian adalah petani usia lanjut, dengan rendahnya partisipasi generasi muda dalam sektor ini. Kelembagaan ekonomi seperti kelompok tani dan koperasi belum mampu berperan optimal sebagai penggerak ekonomi lokal dan penjamin keberlanjutan usaha tani.

4. Kerentanan Sistem Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim

Ketersediaan dan distribusi pangan daerah masih rentan terhadap gangguan cuaca, kekeringan, dan bencana alam. Sistem cadangan pangan belum berjalan optimal, belum terintegrasinya sistem informasi ketahanan pangan, serta belum kuatnya sistem logistik pangan antar pulau merupakan tantangan serius dalam menjamin ketahanan pangan lokal.

5. Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Perlindungan Lahan Pertanian

Terjadi tren alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang berkembang secara spasial. Belum ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta lemahnya pengawasan terhadap konversi lahan menjadi hambatan dalam pembangunan sektor pertanian berkelanjutan.

6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Lokal dan Diversifikasi Pangan

Komoditas lokal unggulan seperti kelapa, ubi, jagung, dan hortikultura khas daerah belum sepenuhnya diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Diversifikasi pangan berbasis pangan lokal masih terbatas dan belum menjadi budaya konsumsi masyarakat secara luas.

7. Rendahnya Ketersediaan Data dan Informasi Pertanian yang Akurat

Pengambilan kebijakan sektor pertanian dan ketahanan pangan masih terkendala oleh terbatasnya data spasial, produksi, distribusi, serta ketahanan pangan yang akurat dan terkini. Hal ini menghambat penyusunan program yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat tani.

Tabel 2.2.2. Penentuan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas pertanian unggulan (kelapa, jeruk, padi, jagung, pala, jambu mete, sapi, kambing, ayam)</li> <li>- Luas lahan pertanian dan agroklimat yang mendukung</li> <li>- Lahan pekarangan masyarakat dan pemerintah yang bisa dioptimalkan untuk produksi pangan</li> <li>- Kekayaan sumber daya hayati lokal yang beragam.</li> <li>- Program diversifikasi pangan berbasis local</li> <li>- Pengembangan tanaman biofarmaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam pertanian,</li> <li>- Belum optimalnya produktivitas dan standar kelayakan produksi sentra IKM komoditi unggulan</li> <li>- Belum optimalnya produksi tanaman pangan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia</li> <li>- Perubahan iklim dan Resiko bencana alam</li> <li>- Pemenuhan pangan dan energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krisis Pangan Global yang melanda dunia akibat kekeringan, peperangan, ketidakstabilan politik dunia, serta perubahan iklim</li> <li>- Mudahnya akses informasi dan berkembangnya wawasan masyarakat sehingga pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketahanan dan kedaulatan pangan dengan mendorong peningkatan produksi pangan strategis (beras, jagung, kedelai, cabai, bawang) untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketersediaan pangan nasional.</li> <li>- Produksi yang belum optimal karena perubahan iklim, bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur pertanian masih memerlukan perhatian, terutama dalam hal sistem irigasi, distribusi, dan penyimpanan hasil pertanian</li> <li>- Sistem logistik pangan yang terintegrasi dan informatif belum berjalan optimal</li> <li>- Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok atau konsumsi pangan yang monoton, seperti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Produksi</li> <li>- Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Perlindungan Lahan Pertanian</li> <li>- Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Komoditas Pertanian</li> <li>- Belum Optimalnya</li> </ul>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan tanaman kelapa yang tersebar di seluruh kecamatan</li> <li>- Pengembangan tanaman kakao dan jambu mete</li> <li>- Agroindustri kelapa</li> <li>- Populasi ternak sapi dan kambing yang cukup tinggi dan tersebar</li> <li>- Pengembangan peternakan berbasis kelompok masyarakat (kelompok ternak produktif)</li> <li>- SDM dan kelembagaan petani yang aktif</li> <li>- Lokasi strategis antar pulau, Akses pelabuhan dan pasar lokal-regional untuk pemasaran hasil pertanian</li> <li>- Sinergi dan dukungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hotikultura dan komoditas perkebunan</li> <li>- Belum optimalnya produksi peternakan</li> <li>- Belum optimalnya diversifikasi pangapn untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan</li> <li>- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>menyebabkan pergeseran gaya hidup konsumsi pangan</li> <li>- Standar Perdagangan Internasional dan Keamanan Pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>alam, dan degradasi lahan pertanian</li> <li>- Ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan tertentu</li> <li>- Terjadinya <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> yang dapat menyebabkan kehilangan pangan</li> <li>- Ketidakstabilan Harga, Stok dan Pasokan Pangan Pokok Strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>beras sebabagi sumber karbohidrat yang berdampak pada rendahnya pola pangan harapan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Potensi Lokal dan Diversifikasi Pangan</li> <li>- Kerentanan Sistem Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim</li> <li>- Minimnya Regenerasi Petani dan Kelembagaan Ekonomi Tani</li> </ul>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
pemerintah pusat dan kabupaten serta peluang kemitraan/kerjasama lembaga negara, BUMN, BUMD, BUMS, pelaku usaha dan akademisi	<p>dan teknologi mendukung ketahanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kemandirian pangan dan ketahanan air.</li> <li>- Terjadinya anomali iklim</li> </ul>					

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah :

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera “

Rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

**Bersama** adalah “*Bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat **toleransi** untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun **perekonomian daerah**”.*

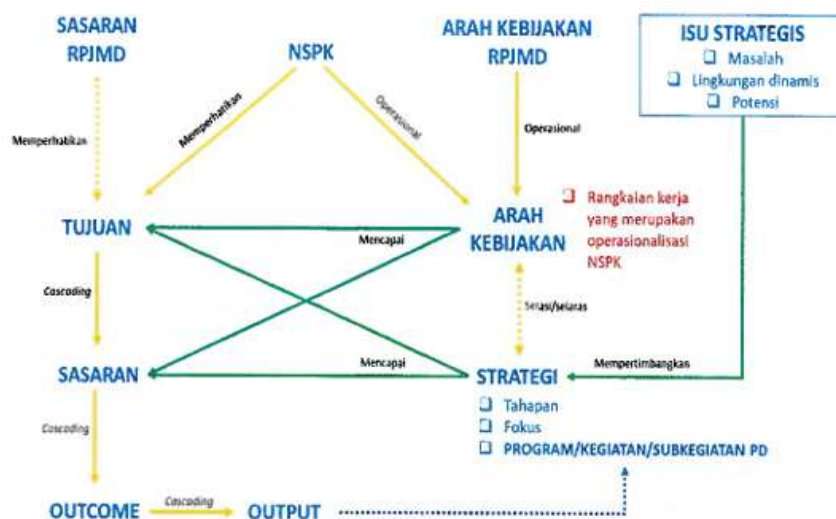
**Membawa** artinya “*Pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera*”.

**Maju** artinya “*Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan **digitalisasi dan teknologi industri** pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan **hilirisasi** sumber daya alam berbasis UMKM dan **huluisasi** pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal*”.

**Sejahtera** artinya “*Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran** dan **kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli** masyarakat*”.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2025-2030 adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif,
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah,
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan,
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah,
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama,
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.



Gambar 2. Konsep Renstra PD

Untuk mendukung Visi yang dijabarkan dalam :

1. Misi ketiga yaitu Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, dan
2. Misi keempat yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merefleksikan konteks tujuan pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu: *Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani*

## 2.2. Sasaran Perangkat Daerah

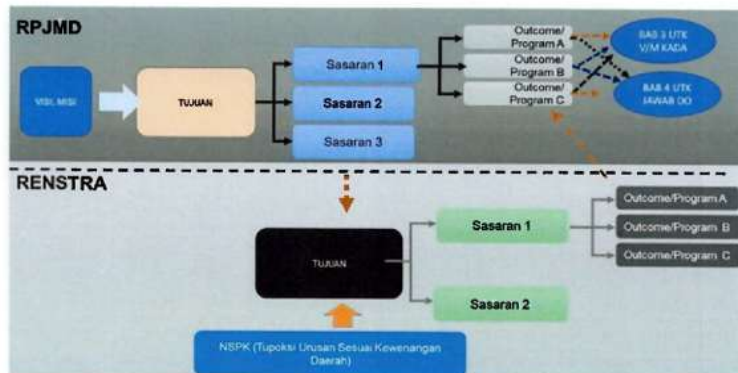
Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya produktifitas pertanian;

Dalam mendukung Misi kesatu yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Misi ketiga yaitu Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, dan Misi keempat yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber daya Perdesaan, maka tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025-2029 adalah Meningkatkan Kemandirian Pangan dan

Kesejahteraan Petani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Meningkatnya Produktifitas Pertanian.



Gambar 3. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan  1	Tujuan  2	Sasaran  3	Indikator  4	Target Tahun						Ket.  11
				2025  5	2026  6	2027  7	2028  8	2029  9	2030  10	
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran  Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar	Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani		Indeks ketahanan pangan	77,39	79,15	80,90	82,66	84,42	86,17	86,17
			Meningkatnya ketersediaan pangan	78,51	79,47	80,31	81,26	82,10	83,03	83,03
		Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas tanaman pangan	49,80	50,30	50,80	51,31	51,82	52,34	52,34
			Produktivitas hortikultura	5,81	5,87	5,93	5,99	6,05	6,11	6,11

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Asal Tumbuhan - Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan - <i>Sasaran 7</i> Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan - <i>Sasaran 12</i> Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan			Produktivitas Perkebunan	12,34	12,46	12,59	12,71	12,84	12,97	12,97
			Produktivitas peternakan	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	66,00

### **2.3. Strategi Perangkat Daerah**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja.

Strategi merupakan tahapan atau langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan. Strategi mengimplementasikan sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan sejumlah arah kebijakan. Perumusan strategi dirumuskan dengan memperhatikan masalah agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung program prioritas yaitu :

- Hilirisasi sumber daya alam

Hilirisasi sumber daya alam merupakan strategi pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dengan cara mengolah produk primer menjadi barang setengah jadi atau jadi sebelum dipasarkan. Dalam konteks sektor pertanian, hilirisasi diarahkan pada pengolahan hasil-hasil pertanian agar tidak hanya dijual dalam bentuk mentah (raw material), tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

- Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal

Pembangunan berkelanjutan menuntut transformasi dari praktik ekonomi eksploitatif menuju sistem yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Mengintegrasikan potensi sumber daya alam lokal dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan inklusi social, menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merumuskan strategi yaitu Pengembangan produksi dan industri ramah lingkungan yang berbasis potensi lokal, efisiensi sumber daya, serta berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

- Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk & pestisida

Kemandirian pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta fluktuasi harga dan pasokan pangan global. Untuk mencapai kemandirian pangan, daerah perlu memperkuat kemampuan produksi pangan dari dalam wilayahnya sendiri, terutama komoditas strategis seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

merumuskan strategi yaitu Peningkatkan kemandirian pangan daerah melalui optimalisasi produksi tanaman pangan strategis dengan penyediaan bantuan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui prioritas kegiatan setiap tahunnya. Penahapan pembangunan tahunan ini menjadi kerangka kerja untuk mengarahkan sumber daya, waktu, dan dukungan stakeholder secara optimal sehingga pencapaian sasaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Setiap tahapan pembangunan tahunan difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara bertahap. Pada tahun awal periode, fokus diarahkan pada penguatan kapasitas dan penyediaan sarana-prasarana dasar, seperti peningkatan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan penyuluhan teknis kepada petani. Tahapan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi produksi dan meningkatkan kesiapan pelaku utama sektor pertanian.

Adapun penahapan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4. Penahapan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana dasar melalui: -Penyediaan benih unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya. -Peningkatan layanan penyuluhan teknis dan pendampingan petani. -Pembangunan infrastruktur dasar pertanian (irigasi, jalan usaha tani).	Pengembangan hilirisasi dan Kemitraan, antara lain melalui : -Fasilitasi pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) skala desa/kecamatan -Penguatan kelembagaan petani. -kemitraan strategis dengan pelaku usaha lokal, koperasi, dan BUMDes. -Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran	Diversifikasi usaha agribisnis berbasis lokal, diantaranya : - Pengembangan produk olahan berbasis komoditas unggulan lokal. - Peningkatan kapasitas UMKM pertanian (pengetahuan dan keterampilan, penguatan akses permodalan, pengembangan teknologi dan digitalisasi, perluasan pasar dan jaringan, penguatan organisasi dan kelembagaan, serta pemasaran	Pemantapan sistem ketahanan pangan berkelanjutan melalui : - Pelatihan teknologi budidaya ramah lingkungan (organik, konservasi tanah & air). - Pengembangan kewirausahaan agribisnis. - Peningkatan sistem cadangan pangan desa/daerah. - Peningkatan akses dan	Penguatan jejaring kemitraan strategis & inovasi, melalui : -Penguatan jejaring kemitraan lintas sektor (swasta besar, perguruan tinggi, lembaga riset). -Implementasi inovasi teknologi pertanian digital (smart farming, e-commerce hasil pertanian). -Digitalisasi data produk dan konsumsi pangan -Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pendidikan dan

	hasil pertanian.	- Pengembangan kemitraan lebih luas dengan sektor swasta dalam hilirisasi dan pemasaran. - Promosi produk olahan dan sertifikasi mutu.	keterjangkauan pangan - Integrasi kemitraan dengan program ketahanan pangan nasional.	pelatihan berkelanjutan. - Ekspansi pasar global produk unggulan daerah. - Integrasi lintas sektor ketahanan pangan
--	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **2.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RENSTRA secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RENSTRA. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional Perangkat Daerah selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua Perangkat Daerah yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Arah kebijakan disusun mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan penerapan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas petani dan kelembagaan tani, serta pemanfaatan teknologi terintegrasi dengan infrastruktur pendukung dan sektor hilir, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pembangunan pusat pertumbuhan baru	Meningkatkan penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui penguatan teknologi dan kapasitas petani, serta pengembangan kawasan pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Perbup/Rencana Induk Pangan Daerah</li> <li>- Penyusunan Master Plan pertanian</li> <li>- Penetapan desa sentra produksi &amp; desa rawan pangan sebagai prioritas</li> <li>- Pencapaian target produktivitas tahunan padi, jagung, kelapa dalam, jeruk dan hortikulturamnlainnya</li> <li>- Penyusunan kalender tanam berbasis agroklimat, rencana aksi pangan per kecamatan</li> <li>- penyaluran bantuan benih/pupuk via e-RDKK, brigade alsintan, pengembangan UPH, subsidi transportasi pangan antar pulau</li> </ul>
2.	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan strategis berbasis	Meningkatkan kemandirian	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis melalui penerapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring harga &amp; stok mingguan, evaluasi produktivitas minimal 2 kali/tahun, laporan kinerja</li> </ul>

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
	teknologi dan praktik pertanian ramah lingkungan	pangan secara berkelanjutan	pertanian ramah lingkungan, penguatan kelembagaan petani, pengembangan cadangan pangan, serta peningkatan distribusi, akses, dan konsumsi pangan lokal secara berkelanjutan	<p>OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima manfaat: petani tergabung kelompok tani/Gapoktan terdaftar SIMLUHTAN dengan Luas lahan minimal 0,25 ha (kecuali RPL)</li> <li>- Menentukan Lokasi prioritas sesuai peta potensi &amp; status rawan pangan</li> <li>- Menentukan indikator keberhasilan yaitu produktivitas naik <math>\geq 1\%</math>/tahun, IKP <math>\geq 86</math> pada 2030, desa rawan pangan <math>&lt; 5\%</math></li> </ul>

Table 3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kemandirian pangan dan	Meningkatnya ketersediaan pangan	Peningkatkan kemandirian pangan daerah melalui optimalisasi produksi tanaman pangan strategis dengan penyediaan bantuan sarana	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis melalui penerapan pertanian ramah lingkungan, penguatan kelembagaan petani,

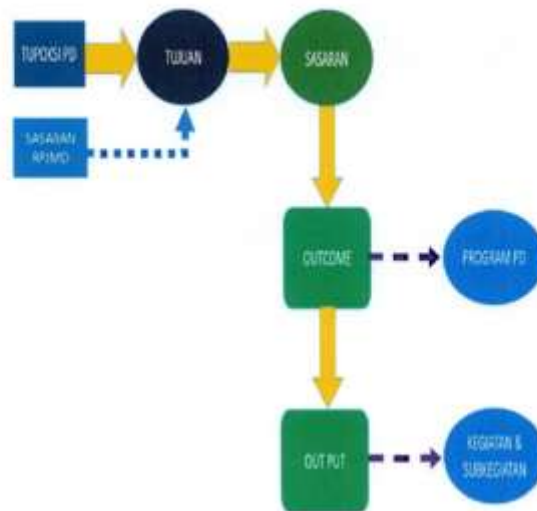
	kesejahteraan petani		produksi seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida secara tepat sasaran dan berkelanjutan.	pengembangan cadangan pangan, serta peningkatan distribusi, akses, dan konsumsi pangan lokal secara berkelanjutan
		Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan melalui pengembangan produksi dan industri ramah lingkungan yang berbasis potensi lokal, efisiensi sumber daya, serta berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui penguatan teknologi dan kapasitas petani, serta pengembangan kawasan pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan, penyusunan rancangan awal, forum perangkat daerah dan perumusan rancangan akhir. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan sejalan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



gambar 4. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan secara konkuren sesuai kewenangannya. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pertanian yang produktif, efisien, berkelanjutan, serta ketahanan pangan daerah yang tangguh, melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas	Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani				Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatnya ketersediaan pangan			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
			<b>Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</b>			<b>Persentase jumlah Cadangan pangan</b>	<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
				<i>Meningkatnya LPM yang mempunyai cadangan pangan</i>	<i>Persentase LPM yang mempunyai Cadangan Pangan</i>	<i>2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1. Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan  -Sasaran 7 Meningkatkan nilai tambah,				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>		<b>skor pola pangan harapan</b>	<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	
				<b>Meningkatnya ketersediaan pangan utama</b>	<b>Persentase ketersediaan pangan utama</b>	<b>2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
produktivitas dan daya saing industri pengolahan  -Sasaran 12 Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan				Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/ kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya cadangan pangan</b>	<b>Persentase penguatan cadangan pangan</b>	<b>2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02.0008 Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
						<b>2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
						<b>2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			<b>Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>		<b>Persentase desa/kelurahan rentan rawan pangan</b>	<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				<b>Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan</b>	<b>Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun</b>	<b>2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				<b>Meningkatnya desa rawan pangan yang tertangani</b>	<b>Persentase desa rawan pangan yang tertangani</b>	<b>2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0008 Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	
			<b>Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan</b>		<b>Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan</b>	<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	
				<b><i>Meningkatnya pangan segar aman dari residu pestisida</i></b>	<b><i>Persentase pangan segar aman dari residu pestisida</i></b>	<b><i>2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		<b>Meningkatnya produktivitas pertanian</b>	<b>Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian</b>		<b>Cakupan Kelompok Tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/peternakan</b>	<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	
				<i>Meningkatnya penggunaan sarana pertanian</i>	<i>Persentase penggunaan sarana pertanian</i>	<i>3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0003 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0004 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	3.27.02.2.01.0008 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0009 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	3.27.02.2.01.0010 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	3.27.02.2.01.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	3.27.02.2.01.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0015 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
				Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	3.27.02.2.01.0017 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	
				<b>Meningkatnya pengelolaan SDG hewan/tanaman</b>	<b>Persentase capaian produksi pertanian</b>	<b>3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				<b>Meningkatnya mutu dan persedaran benih/bibit ternak dan pakan ternak</b>	<b>Persentase capaian produksi peternakan</b>	<b>3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
				Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				<b>Meningkatnya pengawasan obat hewan</b>	<b>Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer</b>	<b>3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	
				Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	3.27.02.2.04.0002 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
				<b>Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan HPT</b>	<b>Persentase bibit ternak dan HPT yang diawasi penyediaan dan peredarannya</b>	<b>3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	3.27.02.2.05.0002 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
				Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
				Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
				<b>Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</b>	<b>Persentase capaian populasi ternak</b>	<b>3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	
				Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			<b>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas</b>		- <b>Jumlah produksi sektor tanaman pangan</b> - <b>Jumlah produksi</b>	<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			<b>prasarana pertanian</b>		<b>sektor tanaman hortikultura</b> - Jumlah produksi sektor Perkebunan - Jumlah produksi sektor peternakan		
				<b><i>Terwujudnya pengembangan prasarana pertanian</i></b>	<b><i>Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan</i></b>	<b><i>3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian</i></b>	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0009 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
				terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				<b>Meningkatnya pembangunan prasarana pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang dibangun dan dimanfaatkan</b>	<b>3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	
				Terbangun, terahabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3.27.03.2.02.0012 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi	3.27.03.2.02.0013 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	
				Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
				Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				<b>Terkelolanya Wilayah sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur yang Dikelola</b>	<b>3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.27.03.2.03.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
				<b>Berkembangnya Lahan Pengembalaan Umum</b>	<b>Luasan lahan penggembalaan umum</b>	<b>Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum</b>	
				Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	3.27.03.2.04.0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	
				Terkelolanya Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	3.27.03.2.04.0003 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
			<b>Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular</b></li> <li>- <b>Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular</b></li> </ul>	<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	
				<i>Meningkatnya pengawasan kesehatan hewan</i>	<i>Persentase capaian angka kesakitan ternak</i>	<b>3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya pengawasan keluar masuknya hewan dan produk hewan</b>	<b>Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan</b>	<b>3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					dan/atau pengeluaran HPM	Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Terawasi dan diperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	
				Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				<b>Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan medic veteriner</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan hewan</b>	<b>3.27.04.2.03. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				<b>Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>Persentase kesehatan masyarakat veteriner yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
				Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
				Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				<b>Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</b>	<b>Persentase unit kesejahteraan hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	
				Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
				Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			<b>Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</b>		<b>Persentase penanganan bencana pertanian</b>	<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	
				<b>Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</b>	<b>Persentase pengendalian dan penanggulangan OPT</b>	<b>3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Perkebunan yang Dikendalikan		
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
				Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
			<b>Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian</b>		<b>Persentase rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan</b>	<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	
				<b>Meningkatnya izin usaha pertanian yang terbit sesuai standar teknis</b>	<b>Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang terbit</b>	<b>3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
				Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
				terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	3.27.06.2.01.0004 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
				<b>Meningkatnya jumlah izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan serta fasilitas ternak</b>	<b>Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang terbit</b>	<b>3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</b>	
				Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
				Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	
				<b>Meningkatnya pengecer obat hewan yang memiliki izin usaha</b>	<b>Persentase izin usaha pengecer obat hewan yang terbit</b>	<b>3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</b>	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	
				Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			<b>Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian</b>		<b>Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan</b>	<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	
				<i>Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan pertanian</i>	<i>Ratio ketersediaan penyuluh pertanian dengan pelaku utama</i>	<i>3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase Cadangan Pangan	0,19	0,2	0	0,2	7.604.800	0,2	7.865.200	0,21	8.616.100	0,21	9.874.800	
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan			0	100	7.604.800	100	7.865.200	100	8.616.100	100	9.874.800	
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			0		0		0		0		0	
2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	0,2	0	0,2	7.604.800	0,2	7.865.200	0,21	8.616.100	0,21	9.874.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta			0		0		0		0		0	
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pangan</b>	111,1	109,8	457.970.000	108,4	455.434.300	107,1	455.087.700	105,7	434.219.200	104,5	460.216.300	
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<b>Meningkatnya ketersediaan pangan utama secara berkelanjutan</b>			369.727.500		180.000.000		370.000.000		185.000.000		185.000.000	
2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			0		0		0		0		0	
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0	0	0	0	10 Keluarga	100.000.000	0	0	0	0	
2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Ko ta		1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	0	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0	0	0	0	0	1 laporan	50.000.000	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota			0	-	0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan			0	-	0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	0	1 laporan	78.242.500	1 laporan	35.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000		
2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	0	1 laporan	98.242.500	1 laporan	30.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000		
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	0	1 dokumen	83.242.500	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Ko ta		1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan pangan yang seimbang dan dikelola		100	82.959.700	100	250.434.300		0	100	124.219.200	100	123.216.300	
2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			0		0		0		0		0	
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		10 ton	200.000.000	1,5 ton	32.689.730		-		-	3 ton	54.658.505	
2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			0		0		0		0		0	
2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kab/Kota yang terpelihara													
2.09.03.2.02.0008 Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi		0	0	10 kelompok	100.000.000	0	0	0	0	1 kelompok	5.000.000		
2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			0	0	0	0	0	25.087.700		35.000.000		40.000.000		
2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		0	0	0	0	1	25.087.700	1	35.000.000		40.000.000		
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan			1 dokumen	5.282.800	1 dokumen	25.00.000	1 dokumen	60.0000.000	1	90.000.000	1	112.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Angka Kecukupan Gizi														
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	9.500.000		0		0	1 dokumen	2.000.000		
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 laporan	2.282.800	1 laporan	8.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000		
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-	-	0	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 dokumen	0	-	0	1 Dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Desa/ Kelurahan Rentan Rawan Pangan</b>	19,32	15,9	30.000.000	14,77	9.676.600	13,64	9.721.700	12,5	9.190.500	11,36	10.700.800	
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				15.000.000		9.676.600		9.721.700		9.190.500		10.700.800	
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	9.676.600	1 dokumen	9.721.700	1 dokumen	9.190.500	1 dokumen	10.700.800	
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			0		0		0		0		0	
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota		1 laporan	15.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	
2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			0		0		0		0		0	
2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan			0	-	0	-	0	-	0	-	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Gizi Kabupaten/Kota													
2.09.04.2.02.0008 Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota			0		0		0		0		0		
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	100	100	35.000.000	100	8.150.480	100	9.654.000	100	9.706.500	100	10.435.600		
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000		8.150.400		9.654.000		9.706.500		10.435.600		
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	8.150.400	1 dokumen	9.654.000	1 dokumen	9.706.500	1 dokumen	10.435.600		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Daerah Kabupaten/ Kota													
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			0		0		0		0		0		
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota		1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0		
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		1 laporan	11.000.000	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0		
2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan		1 dokumen	9.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Kelompok Tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan</b>	4,32	4,36	3.712.291.000	4,41	4.777.669.200	4,45	4.935.411.000	4,50	4.858.719.400	4,54	5.119.679.400		
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				2.162.291.000		2.727.669.200		2.885.411.000		2.808.719.400		2.719.679.400		
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	1.047.438.500	1 laporan	1.309.151.640	1 laporan	1.133.729.630	1 laporan	883.874.220	1 laporan	791.670.410	
3.27.02.2.01.0003 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		2,7 ton	354.852.500	5 ton	658.517.560	6,5 ton	891.681.370	8 ton	1.064.845.180	8 ton	1.068.008.990	
3.27.02.2.01.0004 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	1	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	
3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana	Jumlah pengawasan penggunaan sarana			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pascapanen Perkebunan	pascapanen Perkebunan													
3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0		
3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	8.000 batang	200.000.000	8.000 batang	200.000.000	8.000 batang	200.000.000	8.000 batang	200.000.000	8.000 batang	200.000.000		
3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		5.000 batang	200.000.000	5.000 batang	200.000.000	5.000 batang	200.000.000	5.000 batang	200.000.000	5.000 batang	200.000.000		
3.27.02.2.01.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh			0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Perkebunan Berbentuk Biji														
3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	0	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000		
3.27.02.2.01.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek			0		0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	0	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000		
3.27.02.2.01.0015 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.01.0017 Perbanyakkan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian produksi pertanian/per kebunan		96.81	600.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	1 laporan	500.000.000	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	-	1 dokumen	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	-	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	-	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	
3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				0		0		0		0		0	
3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.04.0002 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam				0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Daerah Kabupaten/Kota														
3.27.02.2.05.0002 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			0		0		0		0		0		
3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar			0		0		0		0		0		
3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			0		0		0		0		0		
3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat			0		0		0		0		0		
3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia			0		0		0		0		0	
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase capaian populasi ternak		98.00%	850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		1.200.000.000	
3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	-	1 ton	100.000.000	1 ton	100.000.000	1 ton	100.000.000	1 ton	100.000.000	1 ton	200.000.000	
3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	-	3.000 ekor	750.000.000	3.000 ekor	750.000.000	3.000 ekor	750.000.000	3.000 ekor	750.000.000	4.000 ekor	1.000.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			0		0		0		0		0	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<b>Jumlah produksi sektor tanaman pangan</b>	18.949,22	19.138,71	2.000.000.000	19.330,10	1.818.050.700	19.523,40	2.634.373.400	19.718,63	3.954.155.800	19.915,82	4.249.013.100	
	<b>Jumlah produksi sektor tanaman hortikultura</b>	7.139,75	7.211,15		7.283,26		7.356,09		7.429,65		7.503,95		
	<b>Jumlah produksi sektor perkebunan</b>	33.154,35	33.485,89		33.820,75		34.158,96		34.500,55		34.845,56		
	<b>Jumlah produksi sektor peternakan</b>	525.264,00	530.516,64		535.821,81		541.180,02		546.591,82		552.057,74		
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian				2.000.000.000		1.400.000.000		2.500.000.000		2.575.000.000		2.575.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1	1.721.518.636	1	700.000.000	1	1.250.000.000	-	0	-	0	
3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan			0		0		0		0		0	
3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan			0		0		0		0		0	
3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan			0		0		0		0		0	
3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pascapanen Hortikultura	dikendalikan dan dimanfaatkan													
3.27.03.2.01.0009 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan			0		0		0		0		0		
3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan		-	-	3 unit	300.000.000	4 unit	400.000.000	5 unit	500.000.000	5 unit	500.000.000		
3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan		-	-	3 unit	100.000.000	5 unit	200.000.000	5 unit	200.000.000	5 unit	200.000.000		
3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang		-	-	1 unit	150.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	500.000.000	2 unit	500.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	dikendalikan dan dimanfaatkan													
3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan		-	-	3 unit	150.000.000	5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000		
3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	-	0	-	0	1	100.000.000	-	0	-	0		
3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di Kabupaten/Kota	/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang dikelola													
3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	-	1 dokumen	287.481.364	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	<b>Persentase prasarana pertanian yang dibangun</b>		95	0		418.050.700		134.373.400		1.379.155.800		1.674.013.100		
3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun,			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pemeliharaan Embung Pertanian	Direhabilitasi dan Dipelihara													
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0	1 unit	418.050.700	1 unit	134.373.400	1 unit	779.155.800	-	0		
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0		0		0	1 unit	600.000.000	-	0		
3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Prasarana Pertanian Lainnya	Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara													
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.02.0012 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.02.0013 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Balai Inseminasi Buatan	dibangun dan direhabilitasi													
3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.03.2.03.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak			0		0		0		0		0	
3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum				0		0		0		0		0	
3.27.03.2.04.0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.03.2.04.0003 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	30,86	31,17	260.000.000	31,48	288.248.900	31,80	287.030.200	32,11	273.283.800	32,43	279.296.500	
	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular	30,86	31,31		31,62		31,94		32,26		32,58		
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		98.511.563		107.927.494		117.343.424		126.759.355	
3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	98.511.563	1 laporan	107.927.494	1 laporan	117.343.424	1 laporan	126.759.355	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(satu) Daerah Kabupaten/Kota	hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota													
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000		
3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jasa Laboratorium dan Jasa Medik dalam daerah kab/kota yang dilayani		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		0		0		0		0	
3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			0		0		0		0		0	
3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			0		0		0		0		0	
3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM			0		0		0		0		0		
3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi			0		0		0		0		0		
3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan													
3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan			0		0		0		0		0		
3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik			0		0		0		0		0		
3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				0		0		0		0		0		
3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan			0		0		0		0		0	
<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase penanganan bencana pertanian</b>	59,69	59,95	60.690.000	60,22	52.420.400	60,49	62.363.300	60,76	64.4670.000	61,03	59.608.500	
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Bencana daerah yang ditangani		100	60.690.000		52.420.400		62.363.300		64.4670.000		59.608.500	
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 ha	15 ha	55.571.342	15 ha	26.315.004	15 ha	28.286.904	15 ha	32.247.383	15 ha	32.735.995	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		2 ha	5.118.658	10 ha	26.105.396	10 ha	34.076.396	10 ha	32.219617	10 ha	26.872.505	
3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			0		0		0		0		0	
3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulan n pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			0		0		0		0		0	
3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			0		0		0		0		0	
<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan</b>			0		0		0		0		0	
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			0		0		0		0		0	
3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			0		0		0		0		0	
3.27.06.2.01.0004 Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budida ya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/bu didaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik			0		0		0		0		0	
3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
dan Izin Usaha Pertanian														
3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0		0		0		0		0		
3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			0		0		0		0		0		
3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Pakan yang Diawasi													
3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0		0		0		0		0		
3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi			0		0		0		0		0		
3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi			0		0		0		0		0		
3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Hewan Mandiri/ Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi													
3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				0		0		0		0		0		
3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen			0		0		0		0		0		
3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi			0		0		0		0		0		
<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase SDM penyuluh pertanian</b>	1,52	4,55	125.000.000	6,06	296.179.000	7,58	304.169.700	9,09	289.503.800	10,61	295.771.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	yang ditingkatkan													
	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	0,00	5,68		11,36		17,05		22,73		28,41			
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian														
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	4 unit	125.000.000	9 unit	296.179.000	10 unit	304.169.700	9 unit	289.503.800	9 unit	295.771.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-		0		0		0		0		0	
3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			0		0		0		0		0	
3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya			0		0		0		0		0	
3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk			0		0		0		0		0	
<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Keuangan OPD</b>			12.737.687.000		11.307.665.400		10.993.197.000		10.481.061.700		10.647.369.900	
	<b>Persentase Capaian Kinerja OPD</b>												
<b>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>	100%	100%	7.500.000	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	3.500.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000	
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Perangkat Daerah													
X.XX.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.01.0012 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Koordinasi Teknis Pembangunan	Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													
X.XX.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			0		0		0		0		0		
<b>X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>		100	10.557.698.500	100	9.798.860.953	100	9.474.936.412	100	8.877.838.499	100	8.781.183.764		
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang	124	10.562.698.500	124	9.783.860.953	124	9.459.936.412	124	8.862.838.499	124	8.766.183.764		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas SN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000		
X.XX.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Akhir Tahun SKPD													
X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	5000.000	1	5000.000	1	5000.000	1	5000.000	1	5000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>		100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	
X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
X.XX.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000		
X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		0		0		0		0		
<b>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian</b>		100	13.000.000	100	3.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugas kan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	4 orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 orang	10.000.000	4 orang	10.000.000	4 orang	10.000.000		
X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor</b>		100	120.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		0		0		0		0	
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000		
X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		0		0		0		0		
<b>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>			200.000.000		0		0		0		0		
X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	70.000.000		2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	
X.XX.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000		
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	10 unit	300.000.000	5 Unit	147.304.447	5 Unit	133.260.588		0	5	150.000.000		
X.XX.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		0		0		0		0		
<b>X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi perkantoran</b>		<b>100</b>	<b>810.000.000</b>	<b>100</b>	<b>810.000.000</b>	<b>100</b>	<b>810.000.000</b>	<b>100</b>	<b>810.000.000</b>	<b>100</b>	<b>810.000.000</b>		
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000		
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000		
<b>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>		100	606.988.500	100	111.000.000	100	132.000.000	100	350.223.221	100	463.186.136		
X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 unit	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Dibayarkan Pajaknya													
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	36 unit	85.000.000	36 unit	60.000.000	36 unit	85.000.000	36 unit	85.000.000	36 unit	85.000.000		
X.XX.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya													
X.XX.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya													
X.XX.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara													
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit	20 unit	7.000.000	20 unit	7.000.000	20 unit	7.000.000	20 unit	7.000.000	20 unit	7.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara													
X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara													
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	4 unit	474.988.500		0		0	3	218.223.201	3	331.186.136		
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			0		0		0		0		0		
X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Dipelihara/ Direhabilitasi													
X.XX.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi			0		0		0		0		0		

### **4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Program prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya strategis yang difokuskan untuk menjawab isu-isu utama dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah dalam jangka menengah. Penetapan program prioritas dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting, potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program Prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yaitu :

#### **1. Membangun Desa**

Pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidupnya pada pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, maupun pelaku usaha kecil di sekitar rantai pasok hasil pertanian. Oleh karena itu, menjadikan pertanian sebagai basis pembangunan desa berarti membangun fondasi ekonomi masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (GEMERLAP) Adalah program prioritas untuk membangun ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan dan peremajaan Perkebunan kelapa. Program ini merupakan strategi Pembangunan desa berbasis pertanian dan Perkebunan yang berkelanjutan. Kontribusinya dapat dilihat dalam beberapa aspek :

- Ekonomi Desa
  - Peningkatan Pendapatan Petani: Kelapa adalah komoditas jangka panjang dengan banyak turunan (kopra, minyak, gula, sabut, arang). Desa akan punya sumber ekonomi berkesinambungan.
  - UMKM dan Industri Desa: Hasil kelapa dapat dikelola menjadi produk lokal (virgin coconut oil, nata de coco, briket, kerajinan), membuka lapangan usaha baru.
  - Penguatan BUMDes: GEMERLAP dapat disinergikan dengan BUMDes untuk penyerapan, pengolahan, dan pemasaran produk kelapa.
- Ketahanan Pangan dan Gizi
  - Daun kelapa, kelapa muda, hingga nira dapat dijadikan sumber pangan dan minuman lokal.

- Integrasi kelapa dengan tanaman sela (padi gogo, jagung, sayur, kacang-kacangan) memperkuat ketahanan pangan keluarga desa.
- Ekologi dan Lingkungan
  - Penanaman kelapa menjaga konservasi lahan dan mengurangi erosi di daerah pesisir.
  - Menambah ruang hijau desa sekaligus mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim.
  - Sistem agroforestri kelapa dapat menjaga keseimbangan ekosistem desa.
- Sosial dan Budaya
  - Membentuk gotong royong baru melalui kegiatan penanaman bersama.
  - Memperkuat rasa memiliki masyarakat desa terhadap program pembangunan.
  - Memberikan identitas lokal: “desa kelapa” yang bisa menjadi branding pariwisata.

Agar kontribusi GEMERLAP nyata dalam pembangunan desa, perencanaan dapat dibuat seperti berikut:

#### A. Tahap Persiapan

1. Identifikasi Potensi Desa
  - Luas lahan yang tersedia
  - Kesesuaian agroklimat
  - Kesiapan petani/masyarakat
2. Perencanaan Kelembagaan
  - Peran BUMDes
  - Keterlibatan kelompok tani dan PKK
  - Dukungan desa dan kabupaten

#### B. Tahap Pelaksanaan

1. Distribusi Bibit: Alokasi jumlah pohon kelapa per keluarga.
2. Penanaman Kolektif Melibatkan masyarakat, ASN, sekolah, dan pemuda desa.
3. Pendampingan Teknis: Penyuluhan, teknologi budidaya, pemeliharaan, dan pascapanen.

#### C. Tahap Pengembangan Ekonomi

1. Integrasi dengan UMKM desa (olah kopra, minyak, kerajinan).
2. Kemitraan pemasaran dengan koperasi, BUMDes, dan investor.
3. Penguatan rantai nilai dari hulu (produksi) ke hilir (pemasaran).

#### D. Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring pertumbuhan pohon.
2. Evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan tiap tahun.

3. Pelaporan ke pemerintah desa dan kabupaten untuk penguatan kebijakan.

Hasil yang Diharapkan :

- Desa mandiri ekonomi berbasis kelapa.
- Lahirnya “desa industri kelapa” yang memproduksi barang bernilai tambah.
- Peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan desa.
- Desa berdaya saing dengan identitas kelapa sebagai produk unggulan.

## 2. Kemandirian Pangan

Kegiatan untuk mewujudkan program kemandirian pangan yaitu :

- Peningkatan kualitas produksi beras jampea, melalui bantuan bibit tanaman padi unggul, bantuan sarana produksi (pupuk dan pestisida), bantuan alat produksi padi (mesin olah tanam dan mesin panen), bantuan alat produksi beras premium (mesin giling) dan pembinaan teknis produksi.
- Peningkatan produksi buah dan sayuran, melalui bantuan bibit jeruk asli selayar hasil teknologi kultur jaringan, bantuan produksi pisang lokal dan pemasarannya, bantuan sarana produksi dan pupuk organik budidaya buah dan budidaya tanaman sayuran.
- Pelaksanaan peternakan unggas, melalui bantuan sarana dan obat-obatan ternak, bantuan layanan kesehatan ternak, bantuan bibit ayam petelur dan ayam pedaging (ayam ras & ayam kampung), bantuan bibit bebek unggul serta pembinaan teknis produksi.
- Penyediaan pakan ternak unggas, melalui bantuan bibit dan saprodi jagung kuning, pengumpulan dedak dan sekam padi jampea, pengumpulan ikan ruca-ruca, bantuan mesin giling pakan
- Pelaksanaan peternakan sapi dan kambing, melalui bantuan sarana dan obat-obatan ternak, bantuan layanan kesehatan ternak, bantuan bibit sapi dan kambing unggul, peningkatan populasi dengan kawin suntik (Enseminasi) serta pembinaan teknis produksi.
- Memasyarakatkan pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan untuk tanaman jagung, umbi-umbian, atau sayuran dengan bantuan sarana produksi gratis
- Meningkatkan produksi pertanian dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.

## 3. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Kegiatan dalam mewujudkan program hilirisasi sumber daya alam yaitu :

- Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (padi/jagung), melalui :

- peningkatan kapasitas produksi dengan bantuan mesin pengolahan padi dan jagung seperti penggiling padi, pengering, dan mesin pembuat tepung jagung, Pelatihan teknologi pengolahan beras premium dan produk turunan jagung seperti tepung jagung dan pakan ternak. Optimalisasi gudang penyimpanan dan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.
- Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk
- Akses Pasar dan Kemitraan
- Pengembangan industri pengolahan hasil tanaman hortikultura (jeruk asli selayar)
  - Pengolahan dan Peningkatan Nilai Tambah melalui pembangunan industri pengolahan jeruk untuk produk seperti jus jeruk, sari buah, dan sirup jeruk, Bantuan mesin ekstraksi sari jeruk, pengeringan kulit jeruk, dan pengemasan produk serta Pengembangan produk turunan jeruk seperti manisan jeruk, minyak atsiri dari kulit jeruk, dan olahan berbasis jeruk
  - Penguatan UMKM Berbasis Hortikultura
  - Penguatan Branding dan Pemasaran dengan membangun brand "Jeruk Asli Selayar" sebagai produk unggulan daerah.
- Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (Kelapa, Jambu Mete, Pala, Cengkeh, Kopi)
  - Peningkatan Teknologi Pengolahan melalui bantuan mesin pengolahan jambu mete untuk produk seperti mete goreng, tepung mete, dan olahan berbasis mete, Optimalisasi pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa, santan instan, dan produk turunan lainnya, Pendirian pabrik mini pengolahan pala dan cengkeh untuk menghasilkan minyak atsiri berkualitas ekspor serta pengembangan industri kopi lokal dengan mesin roasting dan pengemasan modern
  - Peningkatan Daya Saing dan Pasar Ekspor
  - Peningkatan Peran UMKM dan Koperasi petani dan pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan.
  - Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan

#### 4. Pengembangan Sentra IKM

- a. Pengembangan sentra pengolahan emping dan kenari di Kecamatan Bontomanai
  - Identifikasi dan Pemetaan Potensi melalui Survei rumah tangga penghasil emping dan kenari
  - Pembentukan kelembagaan sentra melalui Fasilitasi pembentukan koperasi/kelompok usaha pengolahan

- Peningkatan Kapasitas SDM Pengolah dengan pelatihan teknis pengolahan emping dan kenari
  - Pengadaan & Instalasi Alat Pengolahan berupa pengadaan alat pemecah kenari, oven, penipis emping, vacuum sealer
- b. Pengembangan sentra pengolahan kelapa terpadu di Kecamatan Buki
- Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kelapa, menentukan lokasi sentra produksi dan potensi bahan baku dengan melakukan survei dan pemetaan kebun kelapa, produksi, dan distribusi petani di seluruh desa di Kecamatan Buki.
  - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Petani
  - Pengadaan peralatan dan fasilitas produksi untuk pengolahan kelapa terpadu.
- c. Pengembangan Sentra Pembuatan Gula Merah di Kecamatan Pasimasunggu
- Peningkatan Kapasitas Produksi Gula Merah melalui pemberian bantuan alat produksi tradisional dan modern (wajan besar, tungku efisien, alat cetak gula merah), Pelatihan teknologi pengolahan gula merah berkualitas tinggi serta pemberian bantuan bibit aren unggul untuk meningkatkan produksi bahan baku
  - Diversifikasi Produk dan Pemasaran
- d. Pengembangan Sentra Pengolahan Jambu Mete di Kecamatan Pasimasunggu Timur
- Peningkatan Teknologi Pengolahan melalui pemberian bantuan mesin pengupas mete otomatis untuk efisiensi produksi, Pengolahan biji mete menjadi produk seperti kacang mete panggang, mete goreng, dan tepung mete serta pemanfaatan limbah jambu mete untuk minuman fermentasi dan pakan ternak.
  - Pemberdayaan Petani dan UMKM
- e. Pengembangan Sentra Peternakan Kambing di Kecamatan Pasimarannu
- Peningkatan Populasi dan Kesehatan Ternak melalui pemberian bantuan bibit kambing unggul dan pakan ternak berkualitas, Program inseminasi buatan dan vaksinasi massal untuk meningkatkan produktivitas serta Penyediaan layanan dokter hewan keliling untuk kesehatan ternak
  - Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan
  - Penguatan Kelembagaan dan Akses Modal
- f. Pengembangan Sentra Pengolahan Pisang di Kecamatan Pasilambena
- Peningkatan Kapasitas Produksi melalui pemberian bantuan bibit pisang unggul dan pupuk organik, Pelatihan budidaya pisang

berorientasi industri serta pemberian mesin pengolahan pisang seperti pengering dan alat pengemasan

- Diversifikasi Produk Pisang, diantaranya Pengolahan pisang menjadi keripik pisang, tepung pisang, pisang sale, dan olahan modern lainnya, Pengembangan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan serta pembuatan produk inovatif seperti brownies pisang, selai pisang, dan minuman berbasis pisang
- Akses Pasar dan Branding Produk
- Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan

5. Hulusiasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru berbasis potensi unggulan lokal

a. Fasilitasi peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan

- Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi melalui penyediaan bibit unggul padi, jagung, dan kedelai, Bantuan pupuk organik dan anorganik serta pestisida ramah lingkungan serta Penyediaan alat dan mesin pertanian (hand tractor, mesin tanam, mesin panen)
- Bantuan dan Pembinaan Budidaya Hortikultura melalui penyediaan bantuan bibit jeruk unggul hasil kultur jaringan, pisang lokal, dan sayuran organic, Penyediaan sarana produksi seperti pupuk organik dan pestisida nabati, serta Penerapan teknologi greenhouse dan hidroponik
- Fasilitasi Sarana Produksi dan Revitalisasi Perkebunan melalui penyediaan bibit unggul kelapa, jambu mete, pala, cengkeh, dan kopi, Rehabilitasi perkebunan tua dengan program peremajaan tanaman perkebunan serta peningkatan produktivitas dengan teknologi pemangkasan dan pemupukan berimbang.
- Peningkatan Teknologi Budidaya dan Produktivitas
- Pengembangan Sentra dan Pengolahan Hasil
- Akses Pasar dan Peningkatan Daya Saing Produk

b. Pembinaan petani tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan

- Peningkatan Kapasitas Petani melalui Pelatihan budidaya padi, jagung, dan kedelai berbasis teknologi pertanian modern, Penyuluhan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati untuk pertanian ramah lingkungan serta peningkatan keterampilan dalam pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.
- Penerapan Teknologi dan Inovasi dengan Demonstrasi teknik jajar legowo, sistem irigasi tetes, dan pemanfaatan drone untuk penyemprotan pestisida dan pendampingan penggunaan alat dan mesin pertanian (hand tractor, mesin panen, dryer, dan RMU)

- Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Hortikultura melalui Penyuluhan dan pelatihan budidaya hortikultura (jeruk, pisang, sayuran organik), Pengenalan teknologi greenhouse, hidroponik, dan aeroponik untuk tanaman hortikultura serta Pendampingan dalam pengelolaan hama dan penyakit secara hayati.
- Penguatan Rantai Pasok dan Pemasaran
- Pengolahan Produk Hortikultura
- Peningkatan Keterampilan Budidaya dan Pascapanen melalui Pelatihan teknik budidaya perkebunan (kelapa, jambu mete, pala, cengkeh, kopi), Penyuluhan peremajaan tanaman perkebunan dan teknik pemangkasan serta pemupukan berimbang.
- Penguatan Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- Peningkatan Akses Pasar dan Kemitraan

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Membangun Desa	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa, pengurangan kesenjangan wilayah, dan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi lokal	<b>3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Pengembangan desa tani
			3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
			3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

			3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
			3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
2.	Kemandirian pangan	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan, berkurangnya kerentanan terhadap krisis pangan, serta stabilitas harga pangan local	<b>3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	- Optimalisasi lahan pertanian & pekarangan
			3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	- Penyusunan kalender tanam berbasis iklim
			3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	- Penyediaan cadangan pangan desa
			3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	- Akses pupuk, bibit unggul, dan teknologi modern
			3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	- Pengembangan kawasan padi beras jampea.
			<b>3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	
			3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			<b>3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
			3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				

			3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			<b>3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	
			3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			<b>3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	
			3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
<b>3.</b>	Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Meningkatnya pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, dan daya saing produk lokal di pasar regional,	<b>3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	- Pendirian sentra IKM (kelapa, jeruk, padi) melalui GEMERLAP, dan Kampung Munte
			3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
			3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	- Akses permodalan

		nasional, dan global	3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	dan perizinan UMKM
			3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	- Pengembangan produk olahan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	- Digitalisasi pemasaran produk
			3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
4.	Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Terwujudnya keseimbangan ekologi dan ekonomi, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang	<b>3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	- Pengembangan budidaya tanaman ramah lingkungan
			3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Agrowisata berbasis lingkungan
			3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

#### 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dilakukan melalui pendekatan berbasis kinerja yang terukur dan terarah. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam memastikan arah dan capaian strategis tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah secara kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun rumusan IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komsumsi	Skor	77,5	78,51	79,47	80,31	81,26	82,10	83,03	Presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan
2	Produktivitas tanaman pangan	kw/ha	2,43	49,80	50,30	50,80	51,31	51,82	52,34	Total produksi tanaman pangan di bagi luas lahan yang diusahakan
3	Produktivitas tanaman hortikultura	kw/ha	1,00	5,81	5,87	5,93	5,99	6,05	6,11	Total produksi tanaman hortikultura di bagi luas lahan yang diusahakan
4	Produktivitas tanaman perkebunan	kw/ha	14,41	12,34	12,46	12,59	12,71	12,84	12,97	Total produksi tanaman perkebunan di bagi luas lahan yang diusahakan
5	Produktivitas peternakan	kw/ha	56	56	58	60	62	64	66	Total produksi peternakan di bagi luas wilayah pengembangan

#### **4.4. Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. IKK disusun secara sistematis untuk mencerminkan kinerja utama dari setiap program dan kegiatan, serta menjadi alat pengendali yang efektif dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Penetapan IKK dalam Renstra dapat diukur secara objektif, relevan terhadap sasaran, dan dapat dicapai dalam rentang waktu perencanaan yang ditetapkan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Non Pelayanan Dasar</b>									
	Pangan									
1	Persentase cadangan pangan	Persen	0,19	0,19	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ----- x100%  Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota yang ditetapkan
2	Persentase ketersediaan pangan	Persen	111,1	111,1	109,8	108,4	107,1	105,7	104,5	Jumlah kebutuhan pangan per tahun ----- x100%  Jumlah penduduk
3	Persentase Desa/ Kelurahan Rentan Rawan Pangan	Persen	19,32	17,04	15,9	14,77	13,64	12,5	11,36	jumlah desa/kelurahan rentan rawan pangan -----x100%

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Jumlah total desa/kelurahan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tingkat capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan berdasarkan data pengawasan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dan pre market (registrasi/ sertifikasi/ surveilan)
	<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>									
	Pertanian									
1.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	30,86	30,86	31,17	31,48	31,80	32,11	32,43	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)  ----- x 100%  Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)
3.	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang	Persen	4,32	4,32	4,36	4,41	4,45	4,50	4,54	Jumlah kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan									peternakan ----- x 100% Total jumlah kelompok tani dan kelompok ternak yang terdaftar pada tahun ke t
4.	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	Persen	18.949,22	18.949,22	19.138,71	19.330,10	19.523,40	19.718,63	19.915,82	Jumlah produksi tanaman pangan per tahun
5.	Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	Ton	7.139,75	7.139,75	7.211,15	7.283,26	7.356,09	7.429,65	7.503,95	Jumlah produksi tanaman hortikultura per tahun
6.	Jumlah Produksi sektor perkebunan	Ton	33.154,35	33.154,35	33.485,89	33.820,75	34.158,96	34.500,55	34.845,56	Jumlah produksi tanaman perkebunan per tahun
7.	Jumlah Produksi sektor peternakan	Kg	525,264	525.264	530.516,64	535.821,81	541.180,02	546.591,82	552.057,74	Jumlah produksi ternak per tahun
8.	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak	Persen	30,86	31,00	31,31	31,62	31,94	32,26	32,58	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan tidak menular tahun sebelumnya (t-1)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	menular									----- x 100% Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan tidak menular tahun sebelumnya (t-1)
9.	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	59,69	59,69	60,22	60,49	60,76	61,03	61,03	luas bencana pertanian yang berhasil ditangani -----x 100% total luas bencana pertanian yang terjadi pada tanaman.
10.	Persentase Penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	59,69	59,69	60,29	60,89	61,50	62,11	63,36	DPI yang berhasil ditangani -----x 100% total luas yang terdampak DPI yang terjadi pada tanaman
11.	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan -----x 100% Total Jumlah rekomendasi izin usaha yang teregistrasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	1,52	3,03	4,55	6,06	7,58	9,09	10,61	Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas -----x 100% Jumlah total penyuluh pertanian yang tercatat dalam periode tertentu
13.	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	-	1,14	5,68	11,36	17,05	22,73	28,41	Jumlah koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi -----x 100% Total koperasi yang direncanakan dibentuk

Tabel 4.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2026-2030

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,5	78,0	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	83,5

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan. Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan perubahan regulasi, isu strategis yang terjadi, hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan. Penting bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang mendasari beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai

kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Bersama dengan Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Pelaksanaan Renstra dilakukan melalui Renja setiap tahun
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra dalam mencapai sasaran Renstra.
5. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra menurut peraturan perundangan.
6. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Benteng, April 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN,



**Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M.**

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 197710142015011001